

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP**  
(Studi di Bioskop MalKartini XXI Lampung )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**RANI AFRINAH**  
NPM : 1621030261

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TAHUN 1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP**  
(Studi di Bioskop MalKartini XXI Lampung )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1

Dalam Ilmu Syari'ah

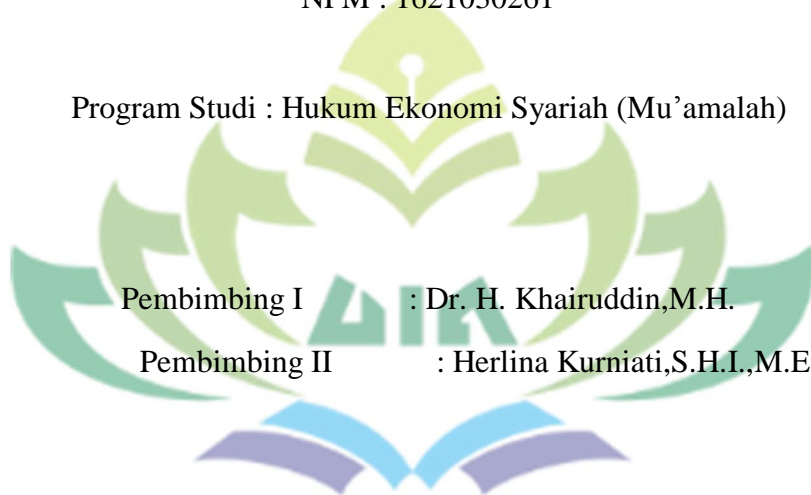
Oleh :

**RANI AFRINAH**  
NPM : 1621030261

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin,M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TAHUN 1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Upah mengupah (*ijarah*) adalah salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang berbentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah juga merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas pekerjaan orang yang telah diselesaikan. *Ijarah* yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat adalah *ijarah* yang dalam transaksinya tidak sah. Konsenkuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Seperti halnya pekerja Bioskop MalKartini XXI Lampung. Dalam sistem pengupahan pada transaksi upah mengupah pekerja bioskop tersebut sama halnya dengan sistem upah mengupah pada pekerja ditempat lainnya, yang mana bentuk kerjanya sesuai dengan akad yang ditentukan sebelumnya. Akan tetapi menonton bioskop tidaklah memenuhi *Syara* karena bioskop saat ini ada semuanya didalamnya ada musik dan alat musik, juga nampak wanita yang buka-bukaan aurat, serta hal mungkar lainnya. Keterkait itu berarti seseorang yang berkerja dibioskop juga ikut serta atau campur tangan dalam melakukan hal-hal yang diharam, seperti halnya didalam menonton bioskop. Rumusah dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah:1) bagaimana pembayaran upah terhadap karyawan di Bioskop MalKartini XXI Lampung. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap upah karyawan Bioskop MalKartini XXI Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah:1) untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah terhadap karyawan di Bioskop MalKartini XII Lampung. 2) untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap upah karyawan Bioskop MalKartini XXI Lampung. Kegunaan penelitian ini adalah, untuk mengetahui lebih jelas sistem pengupahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data langsung dari Manager, pekerja, penonton bioskop dan dari bantuan buku-buku yang terkait dengan judul. Sampelnya adalah karyawan bioskop, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pemikiran menggunakan metode pemikiran induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian upah pekerja bioskop MalKartini XXI Lampung praktiknya adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun terjadi samar karena dari segi objeknya karena didalam bioskop banyak Nampak wanita yang buka-bukaan aurat dan campur baur pria dan wanita, karena dalam Islam tidak diperbolehkan aurat dan mendekatirkan zina.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Afrinah  
NPM : 1621030261  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop”(Studi Pada Bioskop MalKartini Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juni 2020

Penulis



Rani Afrinah

NPM. 1621030261





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop  
(Studi Pada Bioskop MalKartini XXI Lampung)

**Nama** : Rani Afrinah

**NPM** : 1621030261

**Jurusan** : Muamalah

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop**  
(Studi Pada Bioskop MalKartini Lampung), disusun oleh : **Rani Afrinah, NPM : 1621030261**, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Jum'at, 26 Juni 2020**.

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua** : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

**Sekretaris** : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**Penguji Utama** : Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

**Penguji II** : Dr. H. Khairuddin, M.H.

**Penguji III** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210219930310002**



## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9] :105)<sup>1</sup>



---

Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung, Diponegoro,2012),h.204.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbilalamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga skripsi ini akanku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku ayah tercinta (Fathur Rohman) dan ibunda tercinta (Masnila Wati) atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan disetiap waktunya, sabar memberaskanku, menjaga, dan selalu memberikan dukungan penuh dalam moril dan materil, serta curahan kasih dan sayang yang tak terhingga, semoga kelak dapat membanggakan untu kedua orang tua,dan keluarga lainnya, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian didunia maupun akhirat.
2. Kakak tercinta Muhamad Sumantri, Fri Sugiatmi, adik-adiku tersyang Hikmah Nur Hidayah dan M. Rafi Syakhbani dan nenekku tercinta Hj. Rohma terimakasih atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa pemperlancar segala urusan.
3. Almamaterku tercinta dan kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan terbaik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Rani Afrinah. Dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 03 April 1998. Penulis adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Fathur Rohman dan Ibu Masnila Wati, riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) di MI Al-Islamiyah Kotabumi Lampung Utara, lulus pada Tahun 2010
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara, lulus pada Tahun 2013
3. Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara, lulus pada Tahun 2016
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

Bandar Lampung, 19 juni 2020

Rani Afrinah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP (Studi di Bioskop Mal Kartini XXI Lampung)**. Shalawat serta salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantu pemikiran, dan partisipasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr.H. Moh. Mukri , M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Sekertaris Jurusan Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah,M.SI.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., dan Pembimbing II Ibu Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I. yang telah banyak meluanghkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para staf karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberi informasi, data, referensi dan lain-lain.



7. Manager Bioskop Mal Kartini XXI Lampung dan karyawan bioskop yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk meneliti skripsi ini.
8. Teman terdekatku Erlangga Apriliyan yang telah memberi motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan sukses. Amin.
9. Untuk sahabatku Jihan Ayu Wulandari, Ida Saputri, Henisa, Tanti Aulia, dan Karina yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan sukses. Amin.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya kelas E yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan KKN 22 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan Taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbala'lamin.

Bandar Lampung, 19 juni 2020

Penulis

Rani Afrinah  
NPM. 1621030261

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian .....	8

### BAB II : KAJIAN TEORI

A. Akad <i>Ijarah</i> ( Upah-mengupah).....	14
1. Pengertian <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah).....	14
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah) .....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah) .....	24
B. Upah ( <i>Ujrah</i> ).....	30
1. Pengertian upah ( <i>Ujrah</i> ).....	30
2. Dasar Hukum ( <i>Ujrah</i> ) .....	35
3. Rukun dan Syarat ( <i>Ujrah</i> ).....	43
4. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja dalam Islam .....	51
5. Pembagian Upah ( <i>ujrah</i> ) dalam Persepektif Hukum Islam .....	58
C. Tinjauan Pustaka .....	69

### BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN



A. Profil Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	71
1. Sejarah singkat Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	71
2. Sebab-sebab Berdirinya Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	72
3. Visi dan Misi Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	72
B. Pelaksanaan Praktik Upah Pekerja Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	73
1. Sistem Pengupahan Pekerja Bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	73
2. Pola Kerja Bioskop Mal Kartini dan Jumlah Karyawan di Mal Kartini XXI Lampung .....	74
3. Struktur Organisasi Bioskop MalKartini .....	75
4. Karakteristik Pekerja Bioskop MalKartini XXI Lampung .....	77
<b>BAB IV: ANALISA DATA</b>	
A. Pembayaran Upah Terhadap Karyawan di bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap upah Karyawan di bioskop Mal Kartini XXI Lampung .....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop”** (*Studi di Bioskop MalKartini XXI Lampung*), ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini meningkat untuk semua yang beragama Islam.<sup>3</sup>
3. Upah adalah imbalan syang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>4</sup>
4. Pekerja adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dll) dengan menjapat gaji/upah; pegawai pekerja.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia (Depatermen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua Balai Pustaka, 1991), h. 1060

<sup>3</sup> Amir syarifiddin, *Garis-garis besar fiqh* (Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2010), h.9

<sup>4</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 874



5. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.

Berdasarkan uraian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah karyawan Bioskop yang penelitiannya dilakukan di bioskop MalKartini XXI Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Secara objektif**

Secara objektif Upah mengupah dalam suatu pekerjaan kantor atau perusahaan, sudah tidak lazim lagi sudah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya namun dalam praktiknya, terdapat upah pekerja Bioskop MalKartini XXI Lampung melakukan akad *Ijarah* terhadap pengupahan tersebut.

### **2. Secara subjektif**

- a. Tema tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop” menurut saya sangat menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di

---

<sup>5</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama,2011),. h.629

jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- c. Selain itu penelitian proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Bioskop” belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).

### C. Latar Belakang Masalah

Islam memerintah manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi dari hasil bekerjanya akan mendapat suatu imbalan yang disebut upah. Islam membagi waktu menjadi dua yaitu: beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan, sumber daya, bukan hanya pemilik nya semata. Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, baik muslim atau non muslim memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuan nya.<sup>6</sup>

Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa di antara manusia, yaitu antara pemilik usaha dengan tenaga kerja. Antara pemilik bioskop dengan karyawan bioskop akan mendapatkan upah yang akan dibayar oleh pemilik bioskop kepada karyawannya tersebut dengan hasil kerja dari tenaganya tersebut, hubungan inilah yang dalam istilah Hukum Fiqih dinamakan *ijarah*<sup>7</sup>. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya

---

<sup>6</sup> Munrokhim, Misnam, dkk, *Ekonomi Islam*(Jakarta: P3EI, 2007).h. 66-68

<sup>7</sup> Sayid muhamad Husen Fadhullah, *Dunia Wanita Islam*. ( Jakarta: PT Lentera basritama, 2000), Cet Ke-1, h.53



menurut bahasa adalah *al-iwadh*, artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa – menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu.<sup>8</sup>

Salah satu Muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, kerja sama dengan literatur fiqih disebut dengan akad *ijarah al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia. Satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh atau dalam hal ini kuli bangunan, dan pihak lainnya yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. Untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan balasan berupa upah dari pekerjaannya.

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>9</sup> Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsensus yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Sohari Sahroni, Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 1 h.167

<sup>9</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187

ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan<sup>10</sup>. Seperti halnya pekerja Bioskop MalKartini XXI Lampung.

Dalam sistem pengupahan pada transaksi upah mengupah pekerja bioskop tersebut sama halnya dengan sistem upah mengupah pada pekerja ditempat lainnya, yang mana bentuk kerjanya sesuai dengan akad yang ditentukan sebelumnya. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai sebagaimana sabda:

Rasulullah SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari abdillah bin umar ia berkata: berkata rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu majah, shahih).<sup>11</sup>

Adapun yang menjadi alasan para Karyawan Bioskop MalKartini XII Lampung, menerima tawaran transaksi upah mengupah dalam pekerjaan menjadi pekerja di bioskop, selain itu dikarenakan kebutuhan ekonomi semakin banyak dan mendesak dan tidak adanya tawaran pekerjaan membuat pekerja bioskop menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Fiqih Islam, ada pembahasan mengenai persoalan tentang larangan menonton bioskop pada (Fatwa Syaikh Ibnu Baz rahimahullah)

---

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindopersad, 1997),h.90

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987)

“Bioskop dan teater yang saat ini ada semuanya didalamnya ada musik dan alat musik, juga Nampak wanita yang buka-bukaan aurat, serta hal mungkar lainnya, maka tidak boleh masuk kedalamnya dan juga mendatanginya, tidak boleh meridhoinya bahkan wajib mengingkarinya”

Keterkaitan dengan sabda di atas berarti seseorang yang berkerja dibioskop juga ikut serta atau campur tangan dalam melakukan hal-hal yang diharam, seperti hal nya didalam menonton bioskop.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai upah yang terjadi pada pengupahan karyawan Bioskop MalKartini XXI Lampung .

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan bioskop di Bioskop Mal Kartini Lampung.
2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan bioskop di Bioskop Mal Kartini Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembayaran Upah Terhadap Karyawan di bioskop MalKartini XXI Lampung ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap upah Karyawan di bioskop MalKartini XXI Lampung?

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pembayaran Upah Terhadap Karyawan di bioskop MalKartini XXI Lampung.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan di Bioskop MalKartini XXI Lampung.

## **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

Kegunaan penelitian teoritis ini sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi pekerja/masyarakat tentang upah dalam pengupahan pekerja di bioskop.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan *Muamalah*, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>12</sup> Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang upah pekerja di bioskop.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena

---

<sup>12</sup>Hadi, Sutrisno., *Metode Research*, (Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

tertentu. Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>13</sup> Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pekerja dan pengunjung bioskop.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang berfungsi menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan upah pekerja bioskop.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga

---

<sup>13</sup>Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPFE-VII, cet 4, (Yogyakarta:Persada, 1997),h.55.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* Cetakan ke20, (Bandung: alfabeta Cv,2014), h.80.

obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 70 (tujuh puluh), yang terdiri dari 52 pegawai laki-laki dan 18 pegawai wanita.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>15</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Pengambilan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sampel yang terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 1 manager bioskop, 2 orang *Guide*, 1 orang *As-Chief Guide*, 1 orang *Chief Guide*, 1 orang *Security*, 1 orang *Office Boy*, 1 orang *Cafe Bart*.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

---

<sup>15</sup>Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014),h.33

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari pekerja dan penonton di Bioskop MalKartini XXI Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan karyawan di Bioskop MalKartini XXI Lampung menjadi objek penelitian. Metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang di teliti mengenai upah karyawan bioskop.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Peneliti terlibat dengan

---

<sup>16</sup> Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72.



kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian.

Tetapi tidak semua harus diamati oleh penulis, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana mekanisme upah yang terjadi di Bioskop MalKartini XXI Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data, mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dilakukan di Bioskop MalKartini XXI Lampung.

## 5. Pengolahan Data

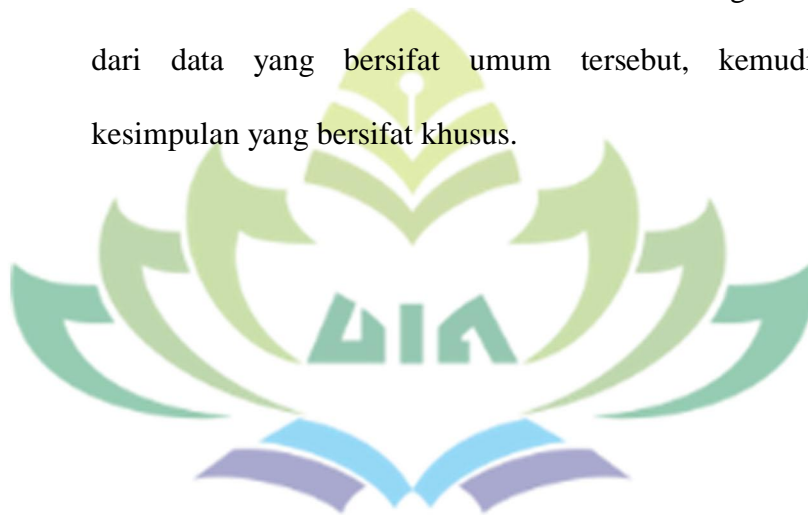
Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



---

<sup>17</sup> Amirullah, Zainal Abidin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti yang berasal *al' iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *Al Ijarah* ialah : “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”<sup>18</sup> secara etimologi *ijarah* ialah upah atau sewa yang diberikan pada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaan nya untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *aj-ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajra-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberi imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>19</sup>

*Ijarah* atau sewa-menyewa dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Ijarah* , *Ijarah* berasal dari kata *ajara* dan memiliki beberapa sinonim, dapan diartikan menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut *Ijarah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-Ijarah* berasal dari kata '*al-ajru*' yang berarti '*al-iwadh*' (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala).

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki*(Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.7.

<sup>19</sup> A. Riawan Amin.Sc, *Buku Pikir Transaksi Syari'ah* (menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa berdasarkan Panduan Islam), ( Jakarta Selatan : PT Mizan Publika,2010) ,h. 145.

Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara memiliki istilah yaitu jual beli manfaat.<sup>20</sup> *Ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha<sup>21</sup>

*Ijarah* berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan.<sup>22</sup> Dalam bahasa Arab *Al-ijarah* diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian jumlah uang. Menurut termologi *ijarah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. *Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah diisyaratkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Islam. Boleh hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>23</sup>

Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.<sup>24</sup> Dan tujuan disyaratkannya *Ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak

---

<sup>20</sup> Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad jual beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", (Jurnal Al Adalah: vol. XII, No. 4, Desember 2015), h.793.

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.101.

<sup>22</sup> AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.120.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216.

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.30.



lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan.<sup>25</sup>

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat benda, *ijarah* bersifat manfaat yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Ijarah* manfaat benda (*Munafi' al-a'yan*) seperti sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara* yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewakan disebut *muajjir* atau *mu'jir* dan biaya disebut *ujrah*. *Ijarah* manfaat dibagi menjadi tiga macam yaitu, *Ijarah* benda yang tidak bergerak (*uqar*), *ijarah* kendaraan baik tradisional maupun modern, dan *ijarah* barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan
- b. *Ijarah* yang berupa manfaat manusia merupakan *ijarah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir* pihak pekerja disebut *ajr* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*, seperti buruh bangun, tukang jahit, pekerja bioskop dan dokter. *Ijarah* jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu, *ijarah* manfaat

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, op. cit., h.217.

<sup>26</sup> Muhammad, *Kebijakan Fisikal dan Moneter Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Selemba empat patria, 2004),h.113.

manusia bersifat umum (*musytarok*), dan ijarah manfaat manusia bersifat khusus (*al-khas*)<sup>27</sup>

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *Ijarah* dikalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafiyyah dan Hanabilah. Ulama Hanafiah, mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Malikiyah dan Hanabilah memberi pengertian bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. Adapun menurut ulama Syafiyyah, akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah *fukaha*, *ijarah* kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu.<sup>28</sup>

Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan pola yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas jasa objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

---

<sup>27</sup> Sunarto dan Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah* ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),h.44.

<sup>28</sup> Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, (Jurnal Al Adalah: vol. XII, No. 4, Desember 2015), h.793.

- b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang menyewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
- c. *Ijarah maushufah al-Dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (mandat 'ain) atau suatu jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kualitas dan kuantitas).<sup>29</sup>

## 2. Dasar hukum ijarah

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum ijarah dalam firman Allah SWT surat Az-Zukhruf [43] ayat 32, berikut ini:


  
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(QS.Az Zukhruf: 32)<sup>30</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa Allah SWT

telah membedakan hamba-Nya berkenaan dengan harta kekayaan,

<sup>29</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, cet ke-1 2001),h.118.

<sup>30</sup> Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung:Diponegoro,2008),h.491.

rezeki, akal, pemahaman, dan sebagaimana merupakan kekuatan lahir dan batin agar satu sama lain saling menggunakan potensinya dalam beramal. Kemudian ayat ini pun dijadikan dasar bahwa pemanfaat jasa atau skil orang lain adalah suatu keniscaya karena Allah menciptakan makhluk nya dengan potensi yang berbeda-beda agar mereka saling bermuamalah.

Allah SWT berfirman dalam surat QS. Al-Baqarah[2] ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu



kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al Baqarah:233)

Ayat ini berisikan bimbingan Allah kepada ayah dan ibu dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dengan tanggung jawab yang diberikan berupa hadirnya anak yang merupakan rahmat dan amanah dari Allah SWT. Pada awalnya ayat ini memberikan bimbingan kepada para ibu bayi agar menyusui anaknya dengan sempurna yaitu selama 2 tahun. Namun dengan penyusuan yang kurang dari dua tahun tidak di karang karena waktu dua tahun ditunjukan bagi mereka yang ingin melakukan proses penyempurnaan.

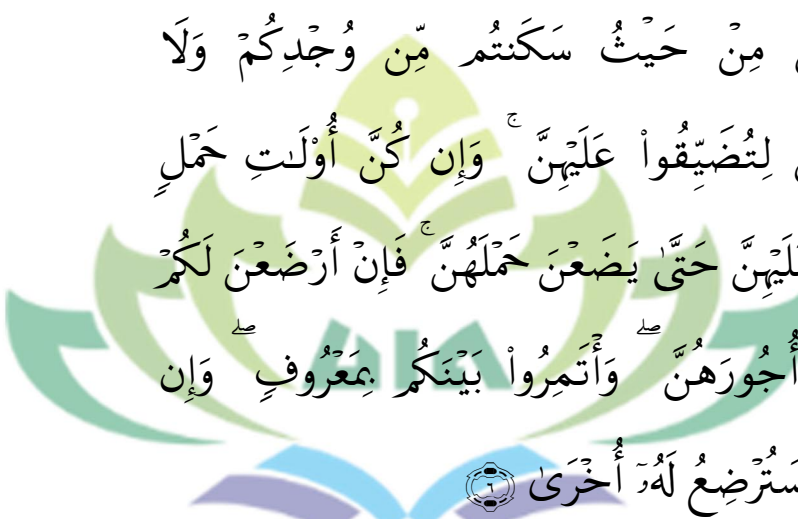
Kemudian ayat ini mewajibkan bagi para ayah untuk memberikan biaya hidup dan sandang yang baik bagi ibu dan bayi selaras dengan adat istiadat yang berlaku dinegara masing-masing tanpa berlebihan atau berkekurangan serta dengan kesanggupan kelancaran si bayi.

Allah SWT berfirman dalam surat QS. Al-Qashash [28] ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS.Al-Qashash:26-27)

Allah SWT berfirman dalam surat QS. Thalaq ayat 6:



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. Thalaq:6)<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit, h.591.

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya. Seperti memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi memperkerjakannya .

**b. Al-Hadits**

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW. Bersabda :

أَعْطُوا الْآخِرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash ra., ia berkata:

كُنَّا نُكْرِئُ الْأَرْضَ بِمَاعَلَا السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقِزٍ.

Artinya: “Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah selesai pekerjaan baik pembayarannya dilakukan sebulan sekali. Karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezholiman.

### c. Al-Ijma

Mengenai disyari'atkan *Ijarah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>32</sup> Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab manfaat bagi manusia.<sup>33</sup> *Ijma* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-sunnah. Umat sepakat *Ijarah* dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini).

Dari penjelasan di atas mengenai dasar hukum *Ijarah* dalam *ijma*, ulama telah sepakat bahwa *Ijarah* belum ada dalil yang melarangnya. *Ijarah* baik dalam sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.<sup>34</sup> Mengenai disyaratkan *ijarah*, semua umat bersepakat bahwa sewa-menyewa adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah dan Takhrij Hadidits* (Bandung: Penerbit Pena, 2010), h. 11.

<sup>33</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Media, 2001), h. 123-124.

<sup>34</sup> Hasan saleh, *Kajian Fiqih Nawawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 387.

kesepakatan *ijma* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### a. Rukun *Ijarah*

*Ijarah* menjadi sah dengan ijab kabul lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukan hal tersebut.<sup>36</sup>

Menurut AH. Azharruddin Lathif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Yang menyewakan dan yang mempersewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), keadaan keduanya tidak bersifat mubazir, baliqh (sampai sedikitnya berumur 15 tahun).
- 2) Sewa disyaratkan keadaan sewa harus diketahui dalam beberapa hal yaitu: jenisnya, kadarnya, dan sifatnya.
- 3) Syarat manfaat:
  - a) Manfaat yang berharga. Adakalanya karena sedikit manfaat, mengakibatkan manfaat itu menjadi tidak berharga menyewa mangga untuk mencium buahnya, sebab mangga adalah barang untuk dimakan.
  - b) manfaat dapat diberikan oleh orang yang mempersewakan.
  - c) Diketahui kadarnya dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2014),h.145.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 11.



Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*<sup>38</sup>.

- a) 'Aqid (orang yang berakad)
- b) *Shighat* akad
- c) *Ujrah* (upah)
- d) Manfaat
- e) Syarat *Ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syara-syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mummayiz (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baliq. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz adalah sah bila telah diizinkan walinya.

---

<sup>37</sup> AH. Azharruddin Lathif, *Op. Cit*, h.122.

<sup>38</sup> Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.125.

Ulama maliki berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baliq adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad mummyiz adalah sah tetapi bergantung atas Ridho wali.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukkalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mummyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fathul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad) *ma'qud'alaih* (yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) yaitu:

- a) Adanya keridhoan dari kedua pihak yang akad syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat QS.

An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Jual beli dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta, syaratnya dengan aqid.

b) *Maqud'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>39</sup>

Syarat *ijarah* menurut AH. Azharuddin Lathif sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi syarat *ijarah* yaitu:

---

<sup>39</sup>Ibid, h. 126.

- 1) Sighat *al-‘aqad* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-‘awidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Al-ujrah* (upah atau sewa)
- 4) *Al-mnafi* (manfaat sewa)

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:


- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantaranya keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baliqh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Maliki bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baliqh, namun anak *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah*, harus jelas memiliki sifat tertentu dalam mempunyai nilai yang bersifat manfaat.  
  
Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara

keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah yang tidak jelas maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.<sup>40</sup>

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan untuk sahnya *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:

1) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah berdalil pada firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat 29:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang-barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya pereselisihan.

---

<sup>40</sup> Abu Axam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 81-82



- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.
- 4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.<sup>41</sup>

Adapun macam-macam berakhirnya *ijarah*:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- 2) Pembatalan akad
- 3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 4) Habis waktu, kecuali kalau uzur.

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 56.

## B. Upah (*Ujrah*)

### 1. Pengertian upah (*ujrah*)

*Ujrah* menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan. Oleh karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.<sup>42</sup> Sedangkan menurut syara *ujrah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>43</sup> Upah juga sering disebut *ijarah 'ala al-a'mal*, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.<sup>44</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ujrah* ialah kepemilikan harta dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*mustajir*), serta pemilikan harta dari *mustajir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).<sup>45</sup> sedangkan menurut pernyataan Prof Benham *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>46</sup>

Menurut bahasa (*etismologi*), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (*termologi*) , upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti.

---

<sup>42</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.29

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.55.

<sup>45</sup> Idris, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.231.

<sup>46</sup> Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>47</sup>

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-urah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>48</sup>

Upah (*ujrah*) adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>49</sup>

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan: "upah adalah hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakukan."<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke-4*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1108.

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 29.

<sup>49</sup> Afzar Rahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Jilid 2), h. 361.

<sup>50</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”.<sup>51</sup>

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik musta’jir (pihak yang memperkerjakan).<sup>52</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk

---

<sup>51</sup> Himunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), h.56.

<sup>52</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86.

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami definisi upah secara umum adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaannya atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yaitu dalam meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Upah menurut beberapa para ahli:

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>54</sup>
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yangb diterima buruh (pekerja) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

---

<sup>53</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing,2016),h.141.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),h.68.

<sup>55</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),h.68.



sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaannya atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yaitu dalam meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Menurut Mulyadi, gaji atau upah merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perbulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>56</sup>

## **2. Landasan Hukum Ujrah**

Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan untuk mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga kesadaran eksistensinya yang kini semakin membuncih harus benar-benar dijaga pertumbuhannya agar mampu membuahkan hasil berupa kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperoleh sekaligus, dan benar-benar dikembangkan adalah kesadaran

---

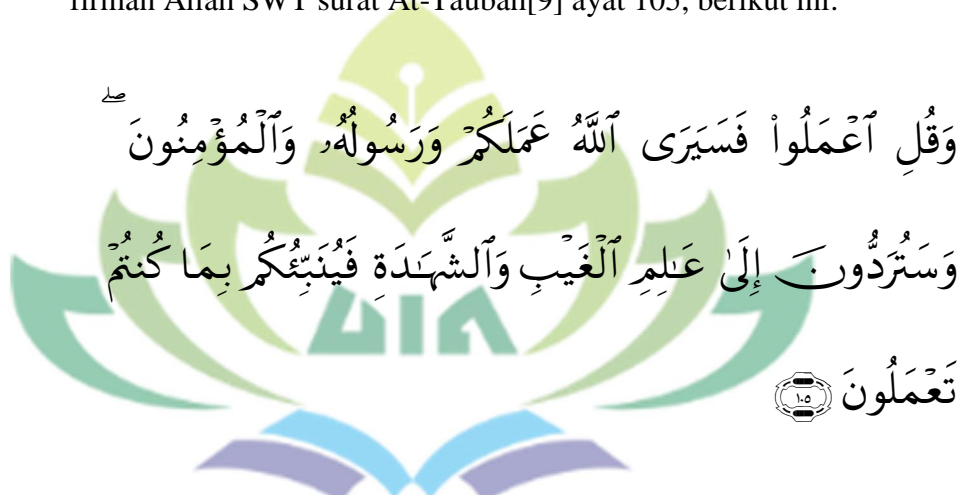
<sup>56</sup> Mulyadi, *akutansi manajemen, konsep Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba empat, 2001), h. 373.

atau persoalan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas yang dihasilkan untuk perusahaan.<sup>57</sup>

dalam syariah Islam, landasan hukum pengupahan (*ujrah*) kaum buruh atau jasa yang diberikan kepada para pekerja dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

ada beberapa dasar hukum yang memperbolehkan upah dalam firman Allah SWT surat At-Taubah[9] ayat 105, berikut ini:



Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah [9]: 105)

---

<sup>57</sup> Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, ( Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002),h.81.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi [18] ayat 30 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ  
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.  
( QS. Al-Khfi [18]: 30)

Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Az-Zumar [39] ayat 34-35 adalah sebagai berikut:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾  
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S Az-Zumar [39] : 34-35)

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah dalam Al-Qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan.

Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Al-Ahqaf ayat 19 adalah sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi para umatnya atas apa yang dikerjakan oleh mereka, sehingga mereka tidak akan pernah dirugikan.

Allah SWT berfirman dalam surat Q.S surat An-Nahl [16] ayat 97 adalah sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ  
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman”. (Q.S An-Nahl: 97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan dunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi orang-orang diatas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran. Kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan. Jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan lainnya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz XXV, cet ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.148.



b. As-Sunnah

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كُنَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه البخاري)

Artinya: “seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberikan upah” (HR.Bukhri)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَوْا الْأَخِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عِرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>59</sup>

Artinya: Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upah nya sebelum keringatnya kering”. (HR.Ibnu Majah)

وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ

عَنْ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ) <sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h.387.

Artinya: “Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “ barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya”. HR. Abdul Razzaq dlam hadis tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadis maushul menurut dari jalan Abu Hanifah).

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada kejelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا أَلَا حَيْرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِيفَ عَزْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَآ حَهُ)

Artinya: “Dari Abdilah Bin Umar ia berekata Rasulullah SAW : berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih)

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَخَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي

(أَيُّ حَلْفٍ بِاسْمِي) ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ

إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW Bersabda,”tiga golongan aku musui keloak dihari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dangan nama-ku, kemudian ia berhianat, seorang yang menjual orang

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *subulus Salam*”Syarah Bulughul Maram”, Jilid 3(JDarus sSunnah, 2017),h.153.

merdeka dan menikmati hasilnya , dan seseorang yang memperkerja kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia mrmrnuhi upah nya.”( H.R.Muslim).<sup>61</sup>

c. *Ijma*

*Ijma* diartikan kesepakatan (*al-itifaq*) terhadap sesuatu, secara *etismologi*, *ijma* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma* umat Muhammad SAW, dalam sesuatu masa setelah beliau wafat derhadap hukum syara.<sup>62</sup> *Ijma* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-sunah. Umat sepakat *ijarah* dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini).

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ujrah* telah disepakati para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>63</sup> Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari sumber barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Trransaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *KhifayatulAkhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, cetak pertama,(Surabaya: Bina Iman, 1994),h.659.

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmi Ushul Fiqih*,(Bandung: Pustaka setia,2009),h.165.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.,Cit.*, h.320

<sup>64</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan implemntasinya pada sektor keuangan syariah)*,(Jakarta: Rajawali Pres, 2017),h.131.

d. Dasar hukum menurut undang-undang

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 tentang Ketenagakerjaan, “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”. Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 8 ayat (1) “menyebutkan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia”.

Pasal 1602 KUH Perdata “majikan diwajibkan membayar kepada buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”.<sup>65</sup> Demikian halnya dengan hak-hak lain yang sepenuhnya diserahkan kepada majikan, karena masalah keperdataan. Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk mencapai keadilan sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit

---

<sup>65</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab-undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2008),h.400.

tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu di ingin menguasai pihak yang lemah.<sup>66</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *ujrah*

#### a. Rukun *ujrah*

Adapun menurut jumruh ulama, rukun *ujrah* ada 4 yaitu sebagai berikut:

##### 1) *Aqid* (orang yang berakal)

*Mu'ajir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (pekerja atau buruh).<sup>67</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal, saling meridhoi dan dapat membedakan. Menurut Asy Syafi'i dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil yang menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu balig.<sup>68</sup> Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah, akan tetapi ulama Hanafiyah dan Maliki berpendapat bahwa kedua

---

<sup>66</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.23.

<sup>67</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), h.170.

<sup>68</sup> Sayid sabiq, *Loc, Cit*

orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Tetapi akan yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad terhadap harta atau dirinya, maka itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>69</sup> Syarat yang terakhir adalah kerelaan dua pihak yang dilakukan adad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukann ujah, maka tidak sah.

Hal ini berdasarkanb firman Allah dalam surat An-Nisa[4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

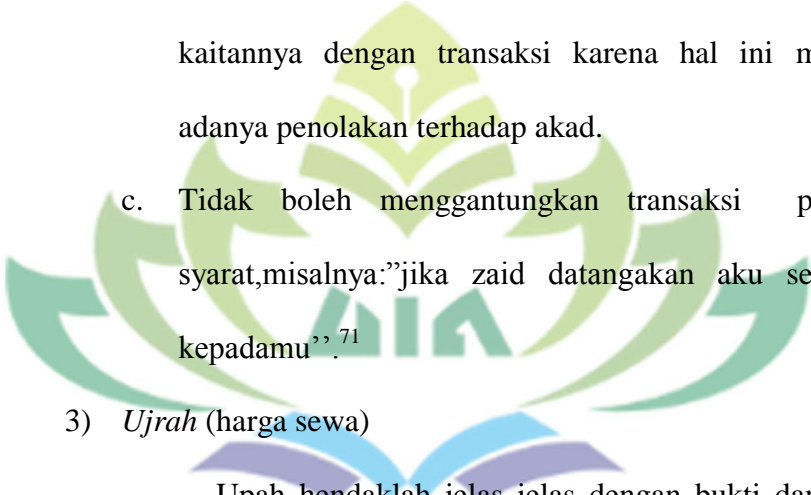
## 2) Shighat

Yaitu ijab dan qabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, ijab qabul upah-mengupah. Syarat shighat yaitu harus dibuat sebelum dipekerjakan, tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama.<sup>70</sup> Shighat transaksi mencangkup hal-hal berikut:

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* cet ke-2, (Jakarta: Gaya Media Prtama,2007),h.387

<sup>70</sup> Khumedi Jafar, *Op.Cit.*, h.189.



- 
- a. ijab dan qabul harus sesuai. Jika seseorang berkata “saya sewakan rumah ini kepadamu seratus ribu sebulan”, kemudian dibalas “saya terima dengan bayaransembilan puluh ribu”, transaksi tidak sah karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.
  - b. Antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak berselang waktu yang lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.
  - c. Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat, misalnya:”jika zaid datangakan aku sewakan ini kepadamu”<sup>71</sup>.

### 3) *Ujrah* (harga sewa)

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah,

---

<sup>71</sup> Mustafa Did Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),h.874.

padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas, Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaiannya atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.<sup>72</sup> Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### 4) Maanfaat

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut.<sup>73</sup>

- a. Dapat ditaksir, maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.

---

<sup>72</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 387.

<sup>73</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 145.

- b. Orang yang menyewakan (*mu'ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*musta'jir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun *Syar'i*, transaksi tidak sah.
- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*musta'jir*). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (*musta'jir*). Setiap para pihak yang melakukan akad harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun, lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan. Terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil yang akan dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Sayid Sabiq, Loc. Cit.

a. Syarat – syarat *Ujrah*

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*

*Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah. *Mu'jir* dan *Mua'jir* adalah yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.

2) *Shigat*

adapun akad (*ijab qabul*), dalam hal yang diisyaratkan:

- a) Akad ijab kabul harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan
- b) Akad ijab Kabul ini tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain
- c) Akad ijab dan Kabul harus terjadi atas kesepakatan bersama<sup>75</sup>

3) *Ujrah*

upah disyaratkan, diketahui jumlah oleh kedua belah belah pihak, adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah adalah sebagai berikut:

1. Tidak berkurang nilainya

---

<sup>75</sup> A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.188-189.

2. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditemukan dengan pasti terlebih dahulu
3. Bisa membawa manfaat yang jelas.
4. Barang  
barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.

Adapun syarat sahnya upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. *ujrah* mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada *ujrah* berupa uang atau barang dan manfaat
- b. upah tatau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.
- c. adanya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa
- d. segala yang berhubungan dengan obyek sewa-menyewa jelas dan transparan
- e. layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek yang sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan, mengenai objek haruslah jelas diketahui

oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan disatu pihak.

- f. hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kreteria, realita dan syara.<sup>76</sup>

#### 4. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Islam

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>77</sup>

Pendapat lain mengatakan tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan.<sup>78</sup>

Waktu pembayaran upah pada perinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaan sesuai dengan perturan Perundang-Undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlah harus dibatasi.<sup>79</sup> Upah dalam konsep

---

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

<sup>77</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Haji Masaguna, 1994), h.45.

<sup>78</sup> Simanjuntak J. Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1991), h.3.

<sup>79</sup> Djumaidi, *Hukum Perbankan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.41.



syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan dan proposional, layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>80</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian kepentingan dua belah pihak.<sup>81</sup> pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tecantum dalam surat al-baqarah:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperintahkan untuk jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan

---

<sup>80</sup> Habiyyallah, *Fikih* (Bandung: Granfindo Media Pertama, 2008), h. 71.

<sup>81</sup> Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jili 1* (Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 361.

<sup>82</sup> Qs. Al-Baqarah[2]: 279

kepada para majikan tidak membayar upah para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai pekerjaan mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelesaikan kepentingan sendiri. Demi kian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al-Jaatsitas

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>83</sup>

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kejasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Adapun sabda Allah SWT tentang prinsip upah disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 adalah sebagai berikut:

وَلِيُؤْفَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

---

<sup>83</sup> Qs.Al-Jaatsiyah[45]:22

Artinya: “dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Islam juga mendorong umat nya untuk bekerja dan memproduksi dan bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerjanya.<sup>84</sup>

Adapun hak-hak pekerja itu mencakup sebagai berikut:

- a. mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia tidak sebagai binatang beban
- b. mewujudkan ketercukupan
- c. kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka
- d. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>85</sup>

Sedangkan kewajiban para pekerja dalam melakukan pekerjaan nya yakni sebagai berikut:

- a. kewajiban para tenaga kerja

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis*( Jakarta: Kencana,2008),h.227.

<sup>85</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta:Kencana, 2012),h.192.

- 1) mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan
- 2) keikhlasan dan ketekunan dalam Islam baik itu karyawan maupun para buruh keduanya tidak boleh membedakan pekerjaan khusus untuk diri nya dan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 3) menunaikan janji
- 4) beritikad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaanya.
- 5) memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi terhadap konsumen
- 6) melayani konsumen dengan jujur ,adil, dan diskriminatif
- 7) berusaha mewujudkan keamanan
- 8) memfokuskan untuk kerja.<sup>86</sup>

dalam prakteknya mempergunakan berbagai potensi yang dimiliki manusia, yaitu potensi fisik yaitu otot, panca indra, mata, telinga, hidung, dan menggunakan potensi rohani yaitu akal, hati, nurani, dan tenaga psikologi lainnya.

Bekerja selanjutnya membutuhkan berbagai fasilitas pendukungnya melalui dari tempat nyaman, keamanan, waktu. Pada

---

<sup>86</sup> Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al—Khathab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar Group),h.674.

demikian pekerja pada intinya adalah melakukan aktifitas kebudayaan dalam arti proses yaitu usaha atau proses, dengan demikian pada hakikatnya adalah upaya penjelmaan diri manusia dalam usaha melanjutkan eksistensinya dalam kehidupan.<sup>87</sup>

Menurut hukum positif menetapkan upah terdapat berbagai sistem pembayaran upah adalah sebagai berikut:

1. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap hari kerja diberikan upah harian dan untuk setiap bulanan diberikan upah bulanan. Untuk sistem pengupahan ini buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negative dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2. sistem upah potongan

Sistem ini sering dipakai untuk mengganti sistem jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan ini dengan ukuran tertentu.

---

<sup>87</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung : Angkasa, 2008), h.56.

### 3. sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat pembongkaran dan mengangkut barang, tetapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan.

### 4. sistem skala upah buruh

Adanya pertalian upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara seperti ini banyak terdapat pada harga pasaran diluar negeri, upah akan naik turun menurut naik turun nya harga barang hasil perusahaan itu.

### 5. upah *indeks*

Upah *indeks* adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya harga tergantung angga indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi *ril* dan upah.

### 6. sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu



#### 7. upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.<sup>88</sup>

#### 8. upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.<sup>89</sup>

### 5. Pembagian Upah (*ujrah*) Dalam Persepektif Hukum Islam

#### a. Sistem pengupahan dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi sesuatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja atau pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli

---

<sup>88</sup> H. Veithzal Riva'I, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),h.807.

<sup>89</sup> Imam Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan cet ke- 7*,(Jakarta: djambatan, 1985)h.131.

menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.<sup>90</sup> Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai khendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil kedalam dunia kerja. Sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari abu Hurairah dimana hadist tersebut memberikan petunjuk agar upah segera dibayarkan.

Pandangan Al-Maliki yang berdasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ajir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

---

<sup>90</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagag Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.1

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan “Transaksi jual beli berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga berlangsung dengan kerelaan ajir dan musta’jir. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*).

Maka keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli dipasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mistl*), Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah. Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja tanpa ada control sangat berbahaya.

Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan memperlakukan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga

hisbah sangat kuat, sehingga saat terjadi kedzaliman antara *ajir* dan *musta'jir*, lembaga hisbah turun tangan menetapkan upah setarah.

Cara lain yang mungkin dipergunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Banisadri, sebagai berikut:

1. menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.
2. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsingnya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia memberi sumbangan terhadap produksi itu sendiri.

Mennghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul al-musamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau *ajrul al-mistl* yang tunduk pada penetapan ahli dasar tenaga kerja.<sup>91</sup>

b. Pihak-pihak dalam menentukan upah

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan upah adalah sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja\ *Musta;jir*

---

<sup>91</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), Hlm.40

Al-Qur'an mendesak orang-orang beriman yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian lain Al-Qur'an menyerukan kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran dan waktu melakukan amal saleh, amal yang produktif, dan sangat merugikan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpel yang sesuai dengan amal\kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS an-nahl

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman”.

Al-Maliki menjelaskan tenaga kerja tidak selalu menghasilkan harta, kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat lain selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian,

perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengerajin mengambil upah, maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur apabila ia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta apapun, namun dia Mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*).

Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting diantara sumber-sumber ekonomi yang lain: pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produksi yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal terkait tenaga kerja antara lain sebagai berikut:

a. Pembagian Tenaga Kerja

Pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menurut Ibn Khaldun, sangat penting karena semakin banyak spesialis kerja, semakin menambah kuantitas dan kualitas produksi, dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, Muhammad Al-Mubarak membagi tenaga kerja dalam dua kategori:

Pertama, tenaga kerja ahli memiliki keahlian pada bidang tertentu. Seperti spesialisasi penerbangan, spesialis tenaga atom, ahli kedokteran dan sebagainya. Mereka ini akan mendapat upah



yang tinggi karena mereka telah menghabiskan dana yang banyak dan waktu yang lama untuk sampai ke tingkat spesialisasi maka tidaklah adil apabila upah yang mereka terima sama dengan upah tukang sepatu, penjaga gedung, penjahit pakaian dan lain-lain.

Kedua, tenaga kerja kasar yang tidak memiliki keahlian tertentu dan golongan ini menempati jumlah terbanyak diantara tenaga kerja. Upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima golongan pertama.<sup>92</sup>

#### b. Seleksi Tenaga Kerja

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban *mutualistic* antara pekerja dan yang memperkerjakan agar tidak terjadi tindakan kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak, maka penetapan kriteria tenaga kerja sangat penting. Menurut Al-Mubarak, adalah salah satu dosa besar menempatkan seseorang yang tidak layak dan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu. Adapun kriteria pemilihan tenaga kerja dalam islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Keahlian

Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan pertama bagi Rasulullah dalam menetapkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh sahabat, generasi pasca generasi sahabat (*tabi'in*). Rasulullah memilih

---

<sup>92</sup> Ibid, hlm 41

Mu'az bin Jabal sebagai gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya. Dengan pertimbangan kemampuan dan keahlian pula, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar al-Khatib untuk mengurus masalah hukum, Ali bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan (ba' al-mal). Abu Yusuf (113-182H)

Memberikan saran kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, agar peran petugas keuangan memiliki pengalaman kerja (*khibrah*), memiliki kemampuan (*kifayah*), dan memiliki pengetahuan (*ma'rifah*). Menurut Afzalur Rahman, keahlian seorang tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan dan latihan. Dalam masyarakat industri maju, keterampilan tenaga kerja sangat penting dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam ajaran Islam pendidikan pelatihan harus cuma-cuma untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.<sup>93</sup>

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengusaha teknologi yang rendah, memaksa negara-negara muslim mengimpor tenaga-tenaga ahli untuk dipekerjakan pada sektor industri yang berbasis teknologi tinggi dengan gaji yang tinggi, sebagaimana yang dialami Indonesia.

Tenaga kerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak

---

<sup>93</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89

mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan orang yang lalai, orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah kedzalim,

## 2. Kesehatan moral dan fisik

Pemikiran ekonomi Islam yang berkaitan dengan kesehatan moral dan fisik sebagai salah satu kriteria pemilihan tenaga kerja diangkat dari kisah Nabi Syu'aib dalam kapasitasnya sebagai *musta'jir* dan nabi Musa sebagai *ajir*, yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashah (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجِرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Afzalur Rahman mengomentari ayat ini "bahwa kekuatan fisik (*al-qawi*) dan kejujuran (*al-amin*) sebagai kekuatan moral merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja yang

cakap. Sifat tersebut dimiliki oleh nabi Musa dan justru karena itu beliau dicontohkan sebagai pekerja. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga kerja ahli, kejujuran merupakan satu unsur yang penting dalam pekerja.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek akal dan fikiran. Akal yang jernih dan fikiran yang cerdas, pertama diperlukan untuk memahami nilai-nilai *normative* etika kerja, dan berguna untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut Ahmad Syarbasyi, tinggi rendahnya derajat seseorang itu dihari akhirat kelak, sangat ditentukan oleh akal. Kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki akal cerdas, berimu pengetahuan, beriman, dan beramal saleh. Syarbaswi dalam bukunya Min Adap Al-Qur'an mengangkat satu peristiwa yang terjadi pada masa rasulullah, sebagai berikut:

Ada seorang laki-laki sangat tekun beribadah, puasa sunah, bedzikir, membaca Al-Qur'an banyak yang mengagumi dan memujinya dihadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya: "Bagaimana akal laki-laki itu?" Mereka menjawab: Ya Rasulullah, kami laporkan kepada engkau ketekunannya, beribadahnya, dan kebbaikannya, tapi engkau tanyakan akalnya?" Lalu Rasulullah berkata "Orang bodoh itu jauh lebih berbahaya dari pada orang yang durhaka, dan diakhirat nanti ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh kalnya".

### c. Etos kerja

Bekerja bagi umat islam tentunya tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal disebuah rumah,memberi nafkah bkeluarga, dan menjalankan bentuk- brntuk ibadah lainnya secara baik.

Ibnu Khaldun telah mengemukakan beberapa arus pemikiran ulama yang hidup pad zaman berkenan dengan akhlak seorang pemimpin untuk melandasi teori etos kerja bagi setiap tenaga ahli. Ada beberapa etika kerja yang dikutip Ibn Khaldun, Misalnya yang termasuk dalam surat Thahir Bin Al-Husain kepada anaknya Abdullah bin khadir yang ditunjuk khalifah al-ma''mun sebagai gubernur. Menurut agar menggunakan waktu dengan baik, Menginvestasikan waktu dan tenaga kerja aktivitas-aktivitas yang bersifat 'amal shaleh'. Ini menunjukkan bahwa islaam mempunyai konsep etos kerja tinngi dalam setiap aktivitas yang positif. Mengabaikan petunjuk al-qur'an tentang waktu, berarti satu kerugian.seorang pekerja harua menyadari bahwa kerja adalah miliknya. Anda membuat gelas, geles itu milik anda.

### C. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa peneliti, ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil penelititemukan adalah penelitian dari Eduwar Wahyu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Tradisional” (Study Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upah tukang pijat. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Tenknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

aturan dan norma-norma Hukum Islam dan tidak diperbolehkan baik laki-laki maupunn perempuan yang bukan mahramnya untuk melakukan praktik pijat kecuali dalam keadaan mendesak, atau bukan membahayakan serta dapat menghilangkan nyawa seseorang sekalipun itu berlainan jenis. Adanya kedua belah pihak antara profesi sebagai tukang pijat dan pasien (*mua'jir* dan *mustajir*), dan bertanggung jawab atas praktik pijat yang dilakukan.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Pradesno Firdaus yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-wedding*” adapun metode yang diambil ialah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah praktek pemberian upah dalam pengambilan foto telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu'amalah yaitu dalam upah mengupah adanya *Mu'jir* dan *Mus'tajir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa ataupun upah-mengupah. Dalam perferktif Hukum Islam memberikan upah kepada fotoghrafer adalah sah atau *shahih* karna telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun menjadi samar (*syubhat*) dari segi objeknya karna ini adalah foto *Prewedding* karna dalam Islam tidak mengenal dengan *Prewedding*.

3. Penelitian selanjutnya yang ditemukan adalah penelitian dari Kahirunnisa yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Penyanyi Dangdut ” adapun metode yang diambil ialah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah hukum penyanyi dan pemain musik bukan hukum yang disepakati oleh para *fuqaha*, melainkan hukum yang termasuk masalah *khilafiyah*, yang artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya lain menghalalkan dengan dalil masing-masing. Haram jika profesi yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT dan menjadikan jalan Allah ejekan. Profesi penyanyi menjadi haram jika disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik dengan perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya disertai dengan *khamar*, zina, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al – Qur'an

Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2008

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2012.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *subulus Salam"Syarah Bulughul Maram"*, Jilid 3, Jakarta: JDarus Sunnah, 2017.

### Buku

Abu Aham Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.

Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Afzar Rahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Jilid 2, 2001.

AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005

Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz XXV, cet ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989

Amir syarifiddin, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2010

Amirullah, Zainal Abidin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

A. Riawan Amin.Sc, *Buku Pikir Transaksi Syari'ah*, Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2010.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmi Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka setia, 2009.
- Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke-4*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Djumaidi, *Hukum Perbankan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Habiyallah, *Fiqih*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008
- H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Hadi, Sutrisno., *Metode Research*, Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hasan saleh, *Kajian Fiqih Nawawi & Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Media, 2001.
- H. Veithzal Riva'i, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Idris, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Surabaya: Bina Iman, 1994.

- Imam Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan cet ke- 7*, Jakarta: djambatan, 1985.
- Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al—Khathab*, Jakarta: Pustaka Alkautsar Group,1998.
- Kamus besar Bahasa Indonesia, Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua Balai Pustaka, 1991.
- Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama,2011.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPFE-VII, cet 4, Yogyakarta:Persada, 1997.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Haji Masaguna,1994.
- Muhammad, *Kebijakan Fisikal dan Moneter Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Selemba empat patria, 2004.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Mulyadi, *akutansi manajemen, konsep Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba empat,2001.
- Munrokhim, Misnam, dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI, 2007.
- Mustafa Did Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani,2002.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Prtama,2007.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana,2008.

- Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab-undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008.
- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Sayid muhammad Husen Fadhullah, *Dunia Wanita Islam*, Jakarta: PT Lentera basritama, 2000.
- Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *fikih sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Simanjuntak J. Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1991.
- Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, cet ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* Cetakan ke-20, Bandung: alfabeta Cv, 2014.
- Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS, 2006.
- Sunarto dan Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wabih Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

## **Jurnal**

Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, *“Akad jual beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”*, (Jurnal Al Adalah: vol. XII, No. 4.

## **Wawancara**

Astri Farenza wawancara dengan penulis, Bioskop Mal Kartini XXI Lampung, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Ahmad Romzani wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung 15 Maret 2020.

Amar Makruf wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Deby Dian Sari wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Eni Sukowati wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Hofi Fatunisa wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 15 Februari 2020.

Nurul Lita wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 15 Februari 2020.

Sinarno wawancara dengan penulis, Bioskop XXI MalKartini Lampung, Bandar Lampung, 3 Februari 2020.

## **Undang-undang**

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan